

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun negara karena pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Perkembangan industri pariwisata tidak hanya pada bisnis perjalanan secara umum, tetapi juga pada tingkatan kunjungan wisatawan secara nasional pada kawasan-kawasan yang dilindungi seperti taman nasional, cagar alam dan sebagainya. Pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(Sumber: <https://caretourism.wordpress.com/2013/11/22/pembangunan-kepariwisataan/> diakses pada 7 april 2015 pukul 13.00 WIB).

Dalam visi pembangunan pariwisata diatas, peran masyarakat dalam membangun sektor pariwisata pada daerah wisata sangat berpengaruh dalam pengembangan dan kemajuan suatu wisata. Industri pariwisata mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam pendapatan devisa negara, kesempatan kerja/ lapangan pekerjaan, pendapatan daerah wisata, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain (industri-industri kecil) di dalam negara penerima wisatawan yang bergerak di bidang pariwisata misalnya usaha penginapan, transportasi, pusat oleh-oleh, maupun usaha kulineri.

Saat ini, Indonesia telah mempunyai banyak tujuan pariwisata. Destinasi pariwisata yang ada di Indonesia memang sangat beraneka ragam. Setiap daerah pastinya mempunyai ciri khas dan karakteristik fisik sektor pariwisata yang berbeda-beda. Setiap tahunnya ada peningkatan mengenai jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan pariwisata ke Indonesia baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Adapun data mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Indonesia maupun di Surabaya:

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April 2015 mencapai 749,9 ribu kunjungan atau naik 3,24 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman April 2014 yang tercatat sebanyak 726,3 ribu kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2015, jumlah kunjungan wisman April 2015 turun sebesar 5,03 persen.
- Secara kumulatif (Januari–April) 2015, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,05 juta kunjungan atau naik 3,44 persen dibanding kunjungan wisman pada

periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 2,95 juta kunjungan. (Sumber: www.bps.go.id diakses pada tanggal 02 Juni 2015 pukul 20.27).

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Tahun 2010-2014

No	Wisatawan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Wisman	168,804	279,230	323,037	350,017	1,068,743
2	Wisnus	7,544,997	9,194,116	9,561,881	8,082,966	13,106,564
TOTAL		7.713.801	9.473.346	9.884.917	8,432,983	14,175,307

Sumber: Data Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Surabaya

Di Indonesia, laju kerusakan hutan bakau mencapai 2,8 juta hektar per tahun dari total luas hutan yaitu seluas 120 juta hektar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dari total luas hutan tersebut, sekitar 57 sampai 60 juta hektar sudah mengalami degradasi dan kerusakan sehingga sekarang ini Indonesia hanya memiliki hutan yang dalam keadaan baik kira-kira seluas 50% dari total luas yang ada. Kondisi semacam ini apabila tidak disikapi segera dengan dilakukan upaya-upaya penyelamatan oleh pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia maka dalam jangka waktu dua dasawarsa Indonesia sudah tidak memiliki hutan lagi (Sumber: Mangrove Information Center,2015).

Dampak dari perubahan iklim tersebut juga mempengaruhi lingkungan di Kota Surabaya. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya giat melaksanakan penambahan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan jargon kota

“Sparkling Surabaya” dan “Surabaya green and clean”. Sebagai kota metropolitan, kota Surabaya tidak pernah melupakan lahan hijau di tengah-tengah pembangunan gedung-gedung bertingkatnya. Pemerintah kota memiliki beberapa program pembangunan seperti aktivasi dan revitalisasi taman-taman kota. Selain itu juga terdapat program untuk mengembangkan taman-taman kota di Surabaya dengan karakteristik yang berbeda-beda sebagai alternatif bagi warga kota.

Di seantero Surabaya, tersebar begitu banyak taman dan lahan hijau yang mampu mengurangi panasnya kota. Ternyata, lahan hijau di Surabaya tidak hanya berada di kota saja. Di sebelah timur Kota Surabaya, tepatnya di daerah Wonorejo, terdapat hutan mangrove Surabaya yang sangat luas serta panorama yang cantik. Kawasan ini merupakan kawasan konservasi pusat mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai yang dilindungi pemerintah setempat.

Hutan lindung mangrove memiliki peran penting bagi kota Surabaya, antara lain sebagai habitat alami flora dan fauna pesisir, pemecah gelombang besar, lokasi persinggahan burung-burung migran dan mengurangi dampak pencemaran limbah di wilayah pesisir. Hutan mangrove sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi abrasi di pantai timur Surabaya. Tentunya di bantu oleh masyarakat sekitar obyek Ekowisata Mangrove Wonorejo.

Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut diprakarsai oleh camat rungkut, lurah wonorejo berserta FKPM Nirwana eksekutif serta di sahkan dengan Keputusan Lurah Wonorejo nomor : 556/157/436.11.15.5/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan dikukuhkan oleh walikota surabaya Drs. Bambang DH pada tgl 9

Agustus 2009 bersamaan dengan peresmian gazebo mangrove, serta pengelolaan diserahkan ke masyarakat wonorejo dan sekitarnya. Dengan misi pada awalnya untuk mengembalikan hutan mangrove akibat penebangan liar. Selama perjalanan, misi ini berkembang menjadi ekowisata.

Konsep ekowisata hutan mangrove wonorejo, disamping menjaga dan mengembalikan hutan mangrove, juga ada pendidikan, pelatihan dan pengelolaan hutan mangrove yang berkesinambungan. Lembaga Ekowisata Hutan Mangrove melakukan usaha-usaha konservasi terhadap hutan mangrove, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal mencegah penebangan liar dan pengerusakan di kawasan konservasi serta membangun fasilitas-fasilitas untuk kegiatan wisata. Selain itu Lembaga Ekowisata juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai ekosistem hutan mangrove (Sumber: <http://surabaya-bagus.blogspot.com/2014/01/wisata-alam-mangrove-wonorejo.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2015 pukul 13.00).

Meski didukung potensi serta fasilitas pendukung memadai, tanpa didukung kemampuan masyarakatnya, belum tentu objek wisata akan berkembang. Masyarakat harus memberikan dukungan secara penuh dan harus mengambil peranan paling depan, begitu juga ekowisata Mangrove Wonorejo. Kemampuan masyarakat memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditimbulkan oleh pariwisata akan dapat mengubah ketidak pastian yang pada awalnya membayangi masyarakat lokal, menjadi satu harapan yang lebih baik dan lebih cerah di masa-masa yang akan datang. Di samping itu, manfaat ekonomi yang ditimbulkan juga akan mampu mengantarkan masyarakat lokal ke kondisi yang

lebih baik, yang pada ujung-ujungnya nanti akan dapat meningkatkan jati diri masyarakat itu sendiri.

Apabila hal ini dapat dicapai oleh masyarakat lokal sebagai sebuah konsekuensi berani menanggung resiko atas pemilihan satu alternatif pembangunan, maka sudah tidak dapat diragukan lagi, bahwa inilah salah satu alternatif pembangunan yang harus dilaksanakan, dipertahankan, dan dikembangkan dikemudian hari oleh masyarakat lokal itu sendiri, sebagai sebuah indikasi bahwa kepentingan masyarakat lokal sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melestarikan kawasan.

Dengan adanya wisata ini diperlukan sekali pemeliharaan lingkungan sekitar obyek wisata. Dan dibutuhkan adanya kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, yang peduli akan keberadaan dan pelestarian lingkungan yang dimiliki Ekowisata Mangrove Wonorejo. Kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan wisata inilah yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata atau disingkat Pokdarwis.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan kepada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalang kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat. Pembangunan kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral, karena itu suksesnya pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah sangat ditentukan oleh adanya

dukungan serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk meningkatkan pengunjung pariwisata, Kelompok Sadar Wisata setempatlah yang harus bisa mengkoordinir dengan baik, supaya fasilitas, keamanan, kenyamanan, pengunjung wisata bisa dijamin dengan baik. Sinerginitas dan kerja sama antara Kelompok Sadar Wisata dengan pemerintah sangat dibutuhkan. Dengan sinerginitas diharapkan akan bisa menghasilkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar destinasi Ekowisata Mangrove Wonorejo dan masyarakat pada umumnya. Langkah nyata dengan dibentuknya Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo ini sebagai misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan pemerintahan setempat terhadap Pokdarwis ini dapat berfungsi sebagai wadah baru dalam masyarakat sebagai penunjang segala aspek pariwisata di tiap tempat agar dapat membantu perkembangan wisata hutan Mangrove. Pokdarwis sebagai lembaga baru dan peraturan di dalamnya ditujukan untuk menggali segala bentuk potensi dalam masyarakat mengenai industri pariwisata. Beberapa dasar hukum yang menjadi payung dalam Penyusunan Pedoman Kelompok Sadar Wisata ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

- 3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.
- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata telah berperan sebagai salah satu unsur penggerak dan turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal di daerahnya, yang secara tidak langsung akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata dalam konteks wilayah yang lebih luas. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Upaya untuk mengungkapkan berbagai kekuatan yang mendorong masyarakat setempat dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda dalam setiap fase pembangunan. Peran pokdarwis menjadi strategis guna mendorong terwujudnya destinasi wisata yang menarik, berdaya saing, dan

memberi nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wisata hutan mangrove Wonorejo.

Fenomena yang di dapat penulis ialah sebelum pembentukan pokdarwis dilakukan sudah terbentuk adanya kelompok pengelola ekowisata mangrove wonorejo, dimana pengelola tersebut ialah masyarakat sekitar obyek wisata. Mereka mengelola seluruh aspek yang diperlukan di dalam sebuah obyek wisata, seperti dari parkir sampai dengan penyewaan perahu serta segala fasilitas di obyek wisata. Ketika dibentuknya pokdarwis, tidak semua anggota pokdarwis tersebut adalah pelaku wisata dan berkepentingan dalam wisata mangrove Wonorejo. Apabila masyarakat sekitar sebagai pelaku wisata telah bergabung dengan pengelola ekowisata mangrove Wonorejo, maka menimbulkan pertanyaan siapakah yang menjadi anggota pokdarwis apabila para pelaku wisata yang berkaitan langsung dengan objek wisata masuk ke dalam kelompok pengelola ekowisata mangrove.

Dari pernyataan tersebut penulis ingin mengetahui tentang kegagalan Pokdarwis di ekowisata mangrove Wonorejo melalui proses pemilihan kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo. Dengan adanya studi ini diharapkan Pokdarwis yang berkaitan menjadi aktif kembali dan menjadi sorotan Dinas Pariwisata Surabaya sehingga peran yang diberikan membawa perubahan Pokdarwis dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang berada di sekitar obyek pariwisata.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pemilihan Kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang proses perekrutan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi wawasan baru untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan serta memberikan kesadaran bahwa pariwisata membawa dampak dalam kehidupan masyarakat lokal.

2. Bagi Penulis

Melalui hasil studi ini, penulis dapat terlibat langsung dalam praktik sosial dan dapat mengetahui sejauh mana teori-teori yang dipelajari dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memperjelas hasil pembahasan penulis memiliki landasan-landasan pemikiran yang menjadi pertanyaan bagi penulis tentang masalah yang diambil sebagai bahan penelitian di lapangan dengan judul studi tentang Proses Pemilihan Kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Landasan-landasan tersebut dibuat dalam bentuk kerangka pemikiran yang telah penulis sajikan sebagai berikut.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



1.4.1 Pembangunan Pariwisata

Di berbagai daerah di Indonesia, sektor pariwisata saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan minat masyarakat yang besar untuk mengunjungi tempat-tempat wisata alam yang ada. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, karena pada dasarnya yang sering disebut tiga pilar utama pariwisata itu terdiri dari pertama pemerintah, kedua swasta dan ketiga masyarakat.

Salah satu prinsip pengembangan pariwisata alam yaitu menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap seluruh kegiatan pembangunan pariwisata dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Masyarakat diletakkan sebagai faktor utama yang memiliki kepentingan berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan.

Dalam kaitan inilah, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin

memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan prioritas dan arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara (devisa), perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan memperhatikan kelestarian lingkungan fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pemanfaatan segala potensi sumber daya yang berupa sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, fauna, hasil karya manusia, budaya serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Menurut Huraerah (2008:12), pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik secara berencana dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan pembangunan ini teori yang diangkat oleh penulis ialah pembangunan sosial. Untuk dapat memahami konsep pembangunan sosial dengan lebih mendalam, ada tiga kategori makna pembangunan sosial, yaitu:

- a. Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, dalam konsep ini bukan tanpa kritik karena pemerintah cenderung menempatkan manusia si

penerima pelayanan sebagai aktor yang harus secara “pasif” menerima pelayanan apapun yang diberikan oleh birokrasi pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan mereka dengan cara, waktu, dan tempat yang telah ditentukan oleh birokrasi. Konsep ini mendekati metode konvensional *top down* yang bercirikan *charity strategy*.

- b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, konsep ini tidak hanya menekankan aspek pelayanan sosial saja, tetapi unsur manusia sebagai penerima pelayanan sosial juga turut mendapat perhatian. Tujuan utama pembangunan sosial adalah melibatkan setiap pribadi dalam proses pembebasan dirinya sendiri dari setiap bentuk dominasi atau tekanan, sehingga setiap individu dapat tumbuh secara lengkap dalam hubungan dengan orang lain.
- c. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat, sebagai upaya untuk mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrat dan masyarakat.

Dari ketiga kategori makna pembangunan sosial yang telah disinggung diatas, kajian penting dari konsep pembangunan sosial adalah peran aktif masyarakat sehingga konsep partisipasi menjadi komponen yang penting. Adapun strategi pembangunan tersebut dalam tiga bentuk strategi utama yang dijelaskan Suharto (dalam Huraerah, 2008:24) yaitu strategi pembangunan sosial melalui pendekatan individu, strategi pembangunan sosial yang lebih menekankan pada

pentingnya masyarakat lokal dan strategi pembangunan sosial yang lebih menekankan pada pemerintah.

Penelitian ini mengarah pada strategi pembangunan sosial yang lebih menekankan pada pemerintah yaitu keyakinan bahwa pembangunan sosial sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, yang terlaksana melalui para perencana kebijakannya, lembaga-lembaga khususnya, serta para administratornya membentuk suatu landasan yang disebut *pendekatan statist* pada pembangunan sosial.

Pendekatan statis berkeyakinan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan sosial rakyatnya, serta memiliki kewenangan memobilisasi sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan strategi ini mengharuskan pemerintah untuk mengupayakan seoptimal mungkin harmonisasi dari perencanaan pembangunan sosial serta mengharuskan para perencana kemajuan sosial untuk bersama membahas upaya perencanaan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Menurut James Midgley (dalam Huraerah, 2008:29) kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali (*social problems are managed*), apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi (*human needs are met*), dan apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan (*social opportunities are maximized*).

Secara yuridis, peranan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial:

- a. Pasal 8 : “ Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 9 : “Untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesar-besarnya bagi usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ialah usaha kesejahteraan dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan”.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan peran masyarakat adalah motivasi yang didasarkan aneka kepentingan, tenaga yang kurang profesional, lingkup pelayanan terbatas, keterbatasan pendanaan, dan pelayanan kurang terkoordinasi (Huraerah, 2009:36). Pada dasarnya, pembangunan pariwisata melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai fasilitator dan pembuat peraturan atau kebijakan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan. Kalangan swasta (pelaku usaha/ industri pariwisata) yang memiliki sumber daya, modal dan jejaring menjalankan peran dan fungsi sebagai pengembang atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Sedangkan masyarakat dengan

sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah, namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya (Pedoman Pokdarwis, 2012:1).

Salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata. Sadar wisata ini menyentuh pada pengembangan destinasi wisata yang sangat bergantung dengan budaya sapta pesona masyarakatnya. Sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam dua hal yaitu masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu atau masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata.

1.4.2 Kelompok Sadar Wisata

Salah satu organisasi yang ikut berperan serta dalam perkembangan pariwisata adalah Pokdarwis, yaitu Kelompok Sadar Wisata. Pokdarwis merupakan salah satu kelompok sosial, sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai kelompok sadar wisata, konsep kelompok dapat mempunyai berbagai makna. Klarifikasi dari Robert Bierstedt (dalam Sunarto 2000:130) menggunakan tiga kriteria untuk membedakan jenis kelompok, yaitu ada tidaknya (a) organisasi,

(b) hubungan sosial di antara anggota kelompok, dan (c) kesadaran jenis. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut Bierstedt kemudian membedakan empat jenis kelompok: kelompok statistik (*statistical group*), kelompok kemasyarakatan (*societal group*), kelompok sosial (*social group*), dan kelompok asosiasi (*associational group*).

Kelompok yang memenuhi ketiga kriteria dan sesuai dengan konsep pokdarwis ialah kelompok asosiasi. Dalam jenis kelompok ini para anggotanya mempunyai kesadaran jenis persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, hubungan sosial, dan ikatan organisasi formal. Disamping itu, di antara para anggota kelompok asosiasi dijumpai adanya hubungan sosial serta adanya kontak dan komunikasi.

Menurut Soekanto (Dalam Huraerah, 2006:14) formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Jika hubungan itu karena pertemuan berulang-ulang secara pribadi maka disebut *clique*.

Teori tentang keinginan manusia bergabung dalam kelompok sebagaimana yang dijelaskan Yusuf (Dalam Huraerah, 2006:28) dengan mengutip beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Teori kedekatan menganggap seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, disebabkan adanya keekatan ruang dan daerah.
2. Teori yang mendasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen (perasaan dan emosi), menurut Miftah Toha (dalam Huraerah, 2006:28) :
 - a. Semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain (shared), semakin beraneka interaksi-interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka.
 - b. Semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yng ditularkan (shared) pada orang lain.
 - c. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain, maka semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dn interaksi-interaksi.
3. Teori keseimbangan, menurut Newcomb (dalam Huraerah, 2006:29) bahwa seseorang tertarik kepada orang lain, didasarkan atas kesamaan sikap dan menanggapi suatu tujuan yang relevan satu dengan yang lain.
4. Teori alasan praktis yang diajukan oleh Reitz (dalam Huraerah 2006:29) adalah menekankan segi motif/ maksud orang berkelompok.

Kelompok Sadar Wisata atau disingkat Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan mensukseskan pembangunan pariwisata nasional. Dengan demikian kelompok

sadar wisata seharusnya merupakan kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kemauan serta kesadaran masyarakat sendiri guna ikut berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai obyek dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan di daerah.

Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah (Pedoman Pokdarwis 2012:11). Sedangkan Kelompok Sadar Wisata, atau disingkat dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

Pokdarwis juga berperan serta dalam mendukung terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat ataupun anggota Pokdarwis, mensukseskan pembangunan kepariwisataan (Pedoman Pokdarwis 2012:16).

Pokdarwis merupakan institusi sosial, lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial. Kornblum (dalam Sunarto, 2000:56) membuat definisi sebagai

berikut “...an institution is a more or less stable structure of statuses and roles devoted to meeting the basic needs of people in society”, yaitu suatu struktur status dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat.

Pokdarwis juga merupakan pekerjaan sosial, seperti yang dinyatakan Zastrow (dalam Huraerah, 2009:38) pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Soetarso (dalam Huraerah, 2009:82) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial.
- b. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya.

Sedangkan memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, dalam Huraerah, 2008:87).

Perwujudan sapta pesona adalah tujuh unsur pesona yang harus diwujudkan agar terciptanya lingkungan yang ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata.

Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona diharapkan dapat secara efektif meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan iklim pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif pada Kelompok Sadar Wisata dalam perwujudan Sapta Pesona, maupun kegiatan lainnya yang dapat saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar Ekowisata Mangrove Wonorejo.

Pokdarwis tentu mempunyai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, lingkup kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan. Para anggota Pokdarwis di harapkan memiliki pengetahuan maupun wawasan tentang pariwisata lebih luas lagi agar dapat memberikan wawasan kepada wisatawan dan menjadi sumber wawasan masyarakat setempat.
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam

mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya. Keramahan masyarakat setempat sangat mendukung wisatawan agar merasa nyaman saat berkunjung.

- 3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona. Salah satunya dengan bersih desa yang dilakukan secara rutin oleh Pokdarwis dibantu oleh masyarakat setempat.
- 4) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat. Diharapkan Pokdarwis dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang sedang berkunjung.
- 5) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat. Dengan adanya saran-saran tersebut pemerintah setidaknya membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar berkembangnya obyek wisata. (Pedoman Pokdawis 2012:27).

Adapun maksud dibentuknya Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran

akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

1. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
2. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat sukarela.

- 2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata
- 4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung.
- 5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.

Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, Penasehat, Pimpinan, Sekretariat, Anggota, dan seksi-seksi (antara lain: Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha). Dalam pemilihan kepengurusan Pokdarwis ini, calon pengurus diperlukan adanya banyak faktor agar sesuai dengan kepengurusan yang akan dijalani. Faktor- faktor itu antara lain keterkaitan pekerjaan di bidang wisata, wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap wisata, berdomisili dekat dengan objek wisata dan ikut serta dalam pengembangan wisata.

Pokdarwis merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan suatu obyek wisata. Dalam pemilihan kepengurusan Pokdarwis juga melibatkan masyarakat dan forum yang menentukan, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan juga termasuk dalam partisipasi masyarakat. Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih yang dilakukan oleh masyarakat atau para pelaku kegiatan. Adapun arti partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap

penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan (Huraerah,2008:96).

Terdapat pengelompokan partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Gaventa dan Valderama (dalam Huraerah, 2008:99) yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Sementara menurut Najib (dalam Huraerah, 2008:100) jika dilihat dari penggunaannya partisipasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Partisipasi sebagai alat yaitu melalui partisipasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggungjawab, dan efisien.
2. Partisipasi sebagai tujuan, yaitu partisipasi merupakan salah satu aspek dari kehidupan bernegara, di mana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan kebijakan.

Menurut Tosun (dalam Madiun, 2004:494), partisipasi memungkinkan masyarakat, orang-orang atau penduduk melakukan berbagai kegiatan pada tingkatan yang berbeda-beda, baik lokal, regional, maupun nasional. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (instrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi yang dilakukanpun dapat berbeda-beda pula, baik partisipasi karena paksaan (*manipulative participation*), karena kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), karena adanya dorongan (*induced*

participation), partisipasi bersifat pasif (*passive participation*), partisipasi secara spontan (*spontaneous participation*).

Tipe partisipasi yang tepat dengan penelitian ini ialah partisipasi manipulasi (*manipulative participation*), merupakan bentuk partisipasi yang dimanipulasi dan diakali sebagai pengganti partisipasi yang nyata. Tujuan partisipasi ini bukan untuk memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembangunan pariwisata tetapi untuk memungkinkan pemegang kekuasaan mendidik atau mencerdaskan masyarakat lokal dengan adanya potensi yang ada, menjadi masa depan pembangunan pariwisata.

Dalam perencanaan partisipatif dikenal dua pendekatan perencanaan yang bersifat memaksa (*top-down planning*) dan pendekatan yang bersifat menghimpun ide-ide dasar dari masyarakat bawah (*bottom-up planning*). Pendekatan *top-down planning* dalam perencanaan maupun pembangunan di Indonesia memiliki banyak kelemahan yang disebabkan oleh ter-*sentralistik*-nya keputusan, pembiayaan, dan pengelolaannya. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan yang kurang efektif mengingat semakin berkembangnya wilayah maupun kota di daerah dan adanya era globalisasi yang menuntut tiap daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain (Huraerah, 2008:67).

Cohen dan Uphoff (dalam Huraerah, 2008:104) menjelaskan sifat khas partisipasi. Sifat khas partisipasi dikenal dengan gagasan “prakarsa” (*initiative*) dan prakarsa ini pada satu pihak datang dari bawah (*bottom-up*), pada pihak lain datang dari atas (*top-down*). Partisipasi *bottom-up* kemungkinan lebih bersifat sukarela daripada paksaan, sedangkan partisipasi lokal yang *top-down*

tindakannya kerap kali melibatkan beberapa jenis paksaan dan disamping ini ada partisipasi yang didorong melalui imbalan-imbalan tertentu.

Berdasarkan paparan tersebut, partisipasi bila dibangun melalui cara memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan dan memberikan pendidikan secara terus menerus untuk menanamkan kesadaran akan perlunya pembangunan. Masyarakat harus diberikan kebebasan dan tanpa ada tekanan serta paksaan untuk ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.

Peran masyarakat menjadi sangat penting artinya sebagai ujung tombak pengembangan wisata. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan. Dan dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah untuk memajukan Ekowisata Mangrove Wonorejo.

Dengan dibentuknya Pokdarwis diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat setempat maupun dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pokdarwis sangat membantu dalam perkembangan suatu obyek wisata. Kegiatan positif yang dilakukan oleh Pokdarwis berdampak positif pula bagi masyarakat maupun perkembangan obyek wisata. Proses pembentukan pokdarwis beserta kegiatannya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Namun Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo belum dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat karena beberapa faktor yang membuat Pokdarwis Ekowisata Mangrove Wonorejo menjadi pasif.

1.4.3 Pemilihan

Menurut Aribowo (2003:50) variasi sistem pemilihan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sistem *Plurality-Majority*, Semi Proporsional, dan Perwakilan Proporsional. Dalam *Plurality-Majority System* menggunakan *single-member district* (satu anggota perwakilan untuk satu distrik). Semi Proporsional, distrik pemilihannya bersifat *multi member*, pemilih mempunyai satu suara untuk pilihannya dan pemenang adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Perwakilan Proporsional ialah distribusi kursi parlemen secara efektif ditentukan oleh jumlah suara nasional yang diperoleh dari pemilihan.

Proses pembentukan Pokdarwis terdapat dua macam yaitu inisiatif masyarakat lokal dan penyuluhan dari pemerintah. Inisiatif masyarakat artinya Pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat. Inisiasi dari instansi terkait bidang kepariwisataan di daerah (Dinas Pariwisata Provinsi/ Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota) pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya.

Menurut Taylor (dalam Madiun, 2010: 23) menegaskan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pembuatan keputusan untuk memastikan bahwa modal sosial mereka diakui dan perencanaan menjadi bagian dari kesadaran sosial dari masyarakat yang ada di destinasi tersebut. Selanjutnya akan membantu mempercepat terwujudnya pembangunan pariwisata berkesinambungan. Namun

dalam pemilihan kepengurusan Pokdarwis bersifat manipulative participation dan penulis ingin mengetahui atas dasar apa masing-masing tersebut dipilih sebagai pengurus Pokdarwis. Padahal, dalam pemilihan kepengurusan sebuah organisasi sangat berpengaruh dalam kinerja maupun dampak yang ditimbulkan nantinya.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2014:6).

Kirk dan Miller (dalam Moleong 2014:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memperoleh data berupa kalimat tertulis atau lisan perilaku, fenomena atau objek studi yang akan ditulis.

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode kualitatif dipilih karena metode ini dianggap lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan

responden lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi.

Dalam tugas akhir ini penulis melakukan penelitian secara deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran-gambaran penyajian laporan. Data tersebut bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendasari sikap dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan cara menggali variabel-variabel yang berhubungan.

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu:

1. Lebih mudah disesuaikan pada permasalahan yang kompleks
2. Menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan yang diteliti.
3. Berupaya mendeskripsikan secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.

Penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitian dan sebagai kunci pokok dalam pengumpulan data, karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Tipe penelitian kualitatif

merupakan kegiatan terstruktur terencana dan berstrategi, untuk itu dalam penulisan tugas akhir ini ditempuh melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penulis melakukan studi literatur untuk mengetahui subyek penelitian sebelum melakukan pengamatan secara langsung pada subjek yang bersangkutan.
2. Proses selanjutnya pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses pemilihan kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sebagai objek penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan tugas akhir.
3. Langkah selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data dari informan sebagai objek penelitian.
4. Melakukan reduksi data oleh peneliti dan menulis hasil transkrip wawancara.
5. Langkah akhir adalah proses penyusunan naskah tugas akhir.

Penelitian difokuskan tentang proses pemilihan kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

1.5.1 Batasan Konsep

Batasan konsep adalah suatu istilah yang digunakan untuk membatasi suatu keadaan, kejadian, individu serta kelompok yang akan kita teliti, sehingga penulisan tersebut menjadi lebih berkualitas dan tidak melenceng kemana-mana. Dalam penelitian seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya inilah yang disebut konsep, yakni istilah dan definisi yang digunakannya untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep ini peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Singarimbun, 1992:333).

Batasan-batasan yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini sehubungan dengan judul yang telah diambil yaitu "Proses Pemilihan Kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya". Peneliti fokus pada pemilihan Pokdarwis, berikut konsep dari pemilihan dan Pokdarwis:

Pemilihan ialah seleksi terhadap seseorang untuk mendapat peranan dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan (Lutfi, 1995:39). Menurut Widodo (Dalam Kamus Ilmiah Populer, 2002:671) Seleksi terhadap sumber daya manusia dalam rangka mengisi posisi atau jabatan lowong sangat penting dilakukan baik dalam organisasi swasta maupun birokrasi pemerintahan.

Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata, atau disingkat dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan (Pedoman Pokdarwis 2012:11).

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan tempat penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus beserta rumusan masalah penelitian, untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah ada kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan.

Dalam penelitian tugas akhir ini peneliti memilih lokasi sebagai objek penelitian yaitu Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:128) bahwa keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula dijadikan dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Peneliti mengambil lokasi di Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan alasan sebagai berikut:

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berada di Ekowisata Mangrove Wonorejo dan telah pasif cukup lama sehingga peneliti ingin mengetahui penyebab dari pasifnya Pokdarwis tersebut melalui fokus proses pemilihannya.
2. Obyek wisata Mangrove Wonorejo terbilang dekat dan salah satu wisata buatan rintisan Kota Surabaya yang tetap mempertahankan keeksistensiannya. Maka peneliti lebih tertarik untuk meneliti karena akses lebih dekat dalam pencarian data. Dan tidak menghabiskan banyak tenaga, biaya maupun waktu yang terlalu lama.

1.5.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam teknik penentuan informan, perlu adanya pengertian mengenai informan itu sendiri yaitu orang dalam penelitian latar atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Adapun persyaratan dalam memilih menentukan informan yaitu harus jujur, tata pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu mengenai suatu hal atau peristiwa yang terjadi (Moleong 2014:132).

Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama

dan informan tambahan. Menurut Hendrarso (dalam Suyanto, 2005:171) informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan dianggap sangat penting bagi peneliti, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi informan. Peneliti menetapkan syarat-syarat tertentu bagi informan. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan empat informan, antara lain:

1. Ketua pengurus Pokdarwis karena disini dapat memberikan informasi tentang proses pemilihan kepengurusan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo serta memberikan informasi lainnya yang membantu peneliti.
2. Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai data-data di obyek Ekowisata Mangrove Wonorejo dan juga informasi lainnya yang membantu peneliti.
3. Sekretaris Kelurahan Wonorejo karena dapat memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti tentang obyek Ekowisata Mangrove Wonorejo.
4. Penanggung Jawab Pokdarwis Dinas Pariwisata Kota Surabaya yang dapat memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan peneliti tentang alur pembentukan Pokdarwis di Ekowisata Mangrove Wonorejo.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu proses yang penting dalam penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang harus ditempuh penulis untuk memperoleh suatu data dengan tepat dan cermat adapun macam dari pengumpulan data secara kualitatif menurut Dede Oetomo (2005) yaitu wawancara, observasi dan penelaahan dari dokumen tertulis maupun data penelaahan dari media internet.

Wawancara adalah dengan maksud tertentu yang dikakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dan terbuka. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Wawancara atau interview yaitu cara yang digunakan untuk dapat memberikan informasi data dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (Mashud, 2005:69).

Dalam penelitian kualitatif pengambilan data dari informan melalui proses wawancara merupakan suatu kunci pokok. Sebab data akan banyak digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Wawancara akan dilakukan setiap akhir pekan selama bulan April-Juni 2015.

Observasi langsung atau pengamatan langsung yaitu pengamatan yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dengan kejadian sebagaimana yang terjadi dan yang sebenarnya (Guba dan Lincoln 1981:191-193). Data yang diambil melalui observasi langsung terdiri dari perincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi personal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Observasi dilakukan di Ekowisata Mangrove Wonorejo. Dan akan dilaksanakan setiap akhir pekan di bulan April-Juni 2015.

Penelaahan dari dokumen tertulis data penelaahan dari media internet dan berita-berita lainnya yang menyangkut dengan judul maupun literatur lainnya. Adapun penggalan-penggalan dari catatan organisasi laporan resmi dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap survey. Pedoman yang digunakan adalah pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Tahap yang harus dilakukan setelah pengumpulan data yaitu analisa data dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data berupa wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi, foto, komentar peneliti, biografi, artikel, dan sebagainya. Kemudian peneliti memberikan penjelasan dalam setiap data yang didapatkan terutama jawaban dari hasil wawancara dengan nara sumber.

Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Dalam hal ini dianjurkan agar analisis data dan penafsirannya secepatnya dilakukan oleh peneliti jangan menunggu data itu menjadi kadaluarsa. Pekerjaan menganalisis memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran peneliti (Moleong,2014:281).

Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2014:282) menganjurkan beberapa petunjuk untuk melakukan analisa data sebagai berikut :

1. Membaca dan menulis catatan lapangan yaitu seluruh data baik yang berasal pengamatan berperan serta, wawancara, komentar, komentar peneliti sendiri, gambar atau foto, dokumen, hendaknya ditelaah secara mendalam.
2. Memberi kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, setelah menelaah dengan teliti, akan ada judul judul tertentu yang akan berulang kali muncul. Setelah membaca seluruhnya dan memperoleh kesan tertentu sebaiknya peneliti memberikan nomor-nomor tertentu pada judul-judul yang muncul.
3. Membaca kepustakaan yang ada kaitanya dengan masalah dan latar penelitian maksudnya adalah membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional.